

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG DALAM
MEMINIMALISIR RESIKO PIUTANG TAK TERTAGIH PADA KSPPS
PUTERI BERSERI SURAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Memperoleh**

Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun Oleh :
Yustania Putri Desambo
21210067

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
SURAKARTA
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yustania Putri Desambo
NIM : 21210067
Program Studi : Akuntansi
Judul : Sistem Pengendalian Internal Piutang Dalam
Meminimalisir Resiko Piutang tak Tertagih Pada
KSPPS Puteri Berseri Surakarta

Disetujui dan disahkan

Hari : Jum'at
Tanggal : 24 Januari 2025

Pembimbing



Tri Ratna Pamikatsih, S.E., M.B.A.

NIDN. 0610119201

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.

NIDN. 0606118902

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Yustania Putri Desambo
NIM : 21210067
Program Studi : Akuntansi
Judul : Sistem Pengendalian Internal Piutang Dalam
Meminimalisir Resiko Piutang Tak Tertagih Pada
KSPPS Puteri Berseri Surakarta

ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan
gelar Sarjana Skripsi Ekonomi.

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 5 Maret 2025

Tim Penguji

Tanda Tangan

Penguji I : Tri Ratna Pamikatsih, S.E., M.B.A.

(.....)

Penguji II : Era Trianita Saputra, S.E., M.Si., M.B.A.

(.....)



Mengetahui,

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.

NIDN. 0606118902

PERNYATAAN PENULIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG DALAM MEMINIMALISIR RESIKO PIUTANG TAK TERTAGIH PADA KSPPS PUTERI BERSERI SURAKARTA

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 23 Januari 2025

Yang memberi Pernyataan




Yustania Putri Desambo

MOTTO

“ Jangan biarkan hari kemarin merenggut banyak hal di hari ini ”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan yang maha Esa, atas segala karunia, kekuatan, serta rahmat yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan perjalanan ini.
2. Orang tua dan keluarga besar saya, yang selalu memberikan dukungan emosional maupun finansial serta selalu mendampingi dimanapun kaki saya melangkah.
3. Dosen pembimbing dan pengajar, yang selalu ada, sabar dan tulus membimbing, mengarahkan, dan memberi inspirasi selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Orang – orang terdekat, yang saya cintai dan saya banggakan yang telah menjadi teman diskusi, pendamping dimasa sulit, memberikan kebahagiaan dan motivasi selama masa perkuliahan, serta selalu berada disamping saya bagaimapun kondisinya baik suka maupun duka.
5. Pihak koperasi, yang menjadi objek penelitian saya, yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian pada koperasi tersebut, sehingga memperlancar proses penulisan skripsi ini.
6. Alamamater tercinta, sebagai tempat dimana saya tumbuh dan belajar, serta menjadi bagian dari perjalanan hidup yang tak terlupakan.
7. Rekan kerja, yang selalu memberi motivasi dan dukungan agar segera lulus dan bekerja di tempat yang bagus.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa selama proses penyelesaian studi ini berlangsung.

Semoga karya sederhana ini menjadi wujud nyata dari rasa terima kasih saya kepada semua yang telah mendukung. Semoga bermanfaat bagi banyak orang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem Pengendalian Internal Piutang dalam Meminimalisir Resiko Piutang tak Tertagih pada KSPPS Puteri Berseri Surakarta”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang 1 (S1) Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Aditya Liliyan S.M.B., M. M. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
2. Bapak Muhammad Syihabuddin S.Hum., M. M. selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
3. Ibu Tri Ratna Pamikatsih, S.E., M.B.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Magang, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama masa bimbingan akademik hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta Bapak dan Ibu Karyawan yang telah memberikan sarana dan prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis hanya bisa mendo'akan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan kebaikan yang lebih.

Aamiinn.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Sukoharjo, 23 Januari 2025

Yustania Putri Desambo

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PENULIS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
Abstrac	xiii
BAB 1	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II	13
A. Kajian Teori	13
1. Definisi Pengendalian Internal	13
2. Tujuan Pengendalian internal	15
3. Unsur Pengendalian Internal	16
4. Prinsip- prinsip Pengendalian Internal	17
5. Keterbatasan Pengendalian Internal	18
6. Pengendalian Internal atas Piutang.....	20
7. Koperasi.....	24
8. Jenis – Jenis Koperasi.....	25
9. Piutang.....	26
10. Piutang Tidak Tertagih	29
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Berpikir	40
BAB III	41
A. Objek Penelitian	41

B. Jenis Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	42
D. Teknik Penentuan Informan.....	43
E. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV	52
A. Pemaparan Data Penelitian	52
1. Gambaran Umum KSPPS Puteri Berseri Surakarta	52
2. Lokasi dan Tata Letak KSPPS Puteri Berseri Surakarta	53
3. Mitra Usaha Koperasi.....	53
4. Program KSPPS Puteri Berseri Surakarta	54
5. Kepengurusan.....	56
B. Analisis Data	59
1. Triangulasi Data	61
2. Reduksi Data	77
C. Pembahasan.....	80
1. Bagaimana persepsi manajemen terhadap pengendalian internal piutang pada KSPPS Puteri Berseri Surakarta ?	80
2. Apa saja Faktor penyebab piutang tak tertagih pada KSPPS Puteri Berseri Surakarta ?	82
3. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal yang sudah terlaksana pada KSPPS Puteri Berseri Surakarta ?	85
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penerapan sistem pengendalian internal untuk meminimalisir resiko piutang tak tertagih pada KSPPS Puteri Berseri Surakarta ?	94
5. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan pengendalian internal piutang pada KSPPS Puteri Berseri Surakarta ?	99
BAB V.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	40
Gambar 2. Struktur Organisasi KSPPS Puteri Berseri	58
Gambar 3. Grafik Perkembangan Kinerja	59
Gambar 4. Grafik Piutang Macet.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai rasio NPL pada Koperasi	4
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3. Triangulasi Sumber.....	62
Tabel 4. Triangulasi Metode	67
Tabel 5. Triangulasi Teori.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	106
Lampiran 2. Transkrip Wawancara Narasumber 1	109
Lampiran 3. Transkrip Wawancara Narasumber 2	112
Lampiran 4. Transkrip Wawancara Narasumber 3	115
Lampiran 5. Transkrip wawancara narasumber 4	118
Lampiran 6. Data Kinerja Perkembangan Usaha	120
Lampiran 7. Data Piutang Macet 2011-2024.....	120
Lampiran 8. Struktur Organisasi KSPPS Puteri Berseri	120
Lampiran 9. Dokumentasi Kegiatan Collecting atau Jemput Dana	121
Lampiran 10. Slip Setoran Bukti Transaksi.....	121
Lampiran 11. Dokumentasi Kegiatan Input Data Setelah Pengumpulan Simpanan dan Piutang.....	122
Lampiran 12. Dokumentasi KSPPS Puteri Berseri Surakarta Tampak Luar	122
Lampiran 13. Dokumentasi Akad Perjanjian Piutang.....	123
Lampiran 14. Dokumentasi Rapat Bersama Pengurus dan Pengawas Syariah	123
Lampiran 15. Dokumentasi bersma pengurus dan pengelola KSPPS Puteri Berseri Surakarta.....	124

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG DALAM
MEMINIMALISIR RESIKO PIUTANG TAK TERTAGIH PADA KSPPS
PUTERI BERSERI SURAKARTA**

Abstrac

This study analyzes the implementation of internal control systems for accounts receivable at KSPPS Puteri Berseri Surakarta to minimize uncollectible debt risks. Using a qualitative case study approach, involving in-depth interviews, observation, and document analysis, this research finds that the existing internal control system is ineffective due to overlapping roles, inconsistent creditworthiness analysis, lack of documentation on uncollectible debt fluctuations, and inadequate supervision. Recommendations include task separation, regular monitoring, and recording uncollectible debts to enhance internal control effectiveness.

Keywords : Accounting, Accounts Receivable Internal Control System, Uncollectible Accounts

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG DALAM MEMINIMALISIR RESIKO PIUTANG TAK TERTAGIH PADA KSPPS PUTERI BERSERI SURAKARTA

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi sistem pengendalian internal piutang di KSPPS Puteri Berseri Surakarta untuk meminimalisir risiko piutang tak tertagih. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif ini menemukan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan belum efektif karena adanya rangkap jabatan, analisis kelayakan kredit tidak konsisten, belum ada catatan mengenai kenaikan atau penurunan kondisi piutang tak tertagih setiap tahunnya dan kurangnya pengawasan. Rekomendasi yang diberikan adalah pemisahan tugas, pengawasan rutin dan pencatatan piutang tak tertagih untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

Kata kunci : Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Piutang, Piutang Tak Tertagih.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi suatu Negara, uang sangat berperan penting. Hal ini disebabkan karena di dalam mengisi kebutuhan pembangunan, uang ini masih dianggap sektor yang paling vital menurut tinjauan ekonomi. Untuk modal mendirikan usaha, usaha kecil maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya tentu saja uang sangat dibutuhkan . Salah satu cara untuk mendapatkan uang itu selain bekerja adalah melalui pinjaman kredit. Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan uang untuk menggerakkan roda perekonomian dirasa semakin meningkat (Amri & Hendarsyah, 2017).

Tingkat ekonomi seseorang juga berbeda beda, disatu sisi ada masyarakat yang memiliki kelebihan dana, namun tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Agar dapat mempertemukan keduanya diperlukan suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan, yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian pinjaman kredit (Amri & Hendarsyah, 2017).

Koperasi adalah usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, Menurut Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1 revisi dari Undang-undang 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 “Koperasi adalah badan usaha yang didirikan orang perorangan atau berbadan hukum yang dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahanya yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip Koperasi”.

Kegiatan koperasi berorientasi pada usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usahanya dan kesejahteraan anggotanya. Untuk melakukan kegiatannya koperasi memerlukan modal. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri (simpanan pokok dan simpanan wajib), modal cadangan, dan modal sumbangan (hibah), serta modal penyertaan. Salah satu kegiatan koperasi adalah simpan pinjam, kegiatan simpan pinjam koperasi dapat meningkatkan permodalan pada koperasi itu sendiri.

Kegiatan simpan pinjam adalah kegiatan untuk menampung dan menyalurkan dana dari anggota yang bersangkutan. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit sendiri merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang simpanan dana dari para anggotanya yang kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yg sedang memerlukan dana.

Dari kegiatan tersebut maka munculah yang namanya piutang antara pihak koperasi dengan anggota yang melakukan pembiayaan tersebut.

Menurut (Siregar, 2019) piutang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pihak yang berutang kepada pemberi utang akibat dari peristiwa masa lalu dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jadi dapat diartikan bahwa piutang adalah aset atau harta perusahaan yang ada dipihak lain akibat adanya transaksi dimasa lalu yang telah disepakati dalam perjanjian oleh kedua pihak, serta pihak kreditur berhak menagih hak tersebut sesuai dengan waktu dan perjanjian yang telah ditentukan.

Piutang merupakan bagian besar dari aktiva lancar setelah kas dan sebagai modal kerja yang diharapkan dapat memperoleh tambahan penghasilan dan laba, namun piutang usaha merupakan aset yang memiliki resiko ketidakpastian dalam usaha, Pemberian piutang mengandung resiko bagi perusahaan berupa kerugian apabila debitur tidak membayar kewajibannya. Apabila piutang tidak dibayar, maka akan menimbulkan piutang tak tertagih. Suatu piutang dapat diidentifikasi sebagai piutang tak tertagih apabila telah jauh melewati tanggal jatuh temponya. Piutang tak tertagih adalah hak untuk menagih sejumlah uang dari penjual kepada pembeli karena adanya transaksi penjualan secara kredit yang belum atau tidak bisa dibayarkan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, piutang perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan.

Berikut data NPL (*Non Performing Loan*) pada koperasi pada periode 2011 – 2024 :

Tabel 1. Nilai rasio NPL pada Koperasi

Keterangan	Realita	Rencana
Dana yang dikeluarkan	1.473.252.553	1.473.252.553
Tunggakan Pokok	741.617.052	73.662.628
NPL	50,33%	5%

Pengelolaan kredit bermasalah atau NPL sangat penting karena hal ini berdampak pada kinerja perusahaan, tingginya NPL dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam menyalurkan kredit, peningkatan NPL atau kredit bermasalah mengakibatkan perusahaan kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba yang optimal karena pendapatan operasional yang kecil serta bunga atau margin yang seharusnya diterima dari penyaluran kredit tidak diterima secara penuh. Tingkat standar NPL yang baik berdasarkan Bank Indonesia dalam (Fauzi, 2018) adalah :

- a) Sangat sehat : $NPL < 2\%$
- b) Sehat : $2\% < NPL < 5\%$
- c) Cukup sehat : $5\% < NPL < 8\%$
- d) Kurang sehat : $8\% < NPL < 12\%$
- e) Tidak sehat : $NPL > 12\%$

Jadi dapat diartikan bahwa standar NPL yang sehat adalah dibawah 5%, sedangkan pada KSPPS Puteri Berseri NPL mencapai 50,33% ini merupakan angka yang sangat besar dan perlu di perhatikan, jika

dibiarkan akan memberikan pengaruh negatif pada perusahaan dimana dampak negatif tersebut salah satunya adalah mengurangi jumlah modal yang dimiliki perusahaan, untuk menjaga perusahaan tetap aman, maka sistem manajemen yang baik perlu diterapkan secara optimal

Salah satu cara agar pihak koperasi yakin bahwa kredit yang disalurkan kepada nasabah aman serta menghindari kredit macet adalah dengan melakukan analisis *5C* (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) sebagai bentuk pengendalian atas piutang usaha, analisis ini mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan dan faktor-faktor lainnya. Seperti yang dikatakan dalam penelitian (Fauzi, 2018) bahwa dalam proses pengajuan kredit PT. X menggunakan prinsip 5C, metode ini dilakukan guna memperkecil resiko kredit macet.

Mengingat Piutang pinjaman merupakan modal kerja yang diharapkan dapat memperoleh tambahan penghasilan dan laba, maka kehadiran piutang pinjaman dapat menimbulkan suatu resiko kerugian yang cukup besar untuk koperasi. Dalam hal ini tentunya diperlukan pengendalian internal terhadap piutang (Zulvia, 2015).

Pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan atau

peraturan hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Hery, 2017). Dengan adanya pengendalian internal piutang perusahaan akan memperhatikan bagaimana pengamanan yang efisien dan efektif dilakukan atas piutang baik dari segi pengamanan atas perolehan fisik kas, pemisahan tugas, sampai pada tersedianya data catatan akuntansi yang akurat sehingga dapat meminimalisir piutang yang tidak dapat ditagih.

KSPPS Puteri Berseri Surakarta adalah koperasi primer kabupaten/kota, koperasi simpan pinjam, berstatus aktif dan berdiri sejak tahun 2011, bergerak dalam sektor bidang keuangan dan asuransi, anggota dari koperasi ini terdiri dari hampir 100% anggotanya adalah wanita, hal ini dikarenakan semua pendiri koperasi tersebut adalah wanita. Lembaga keuangan ini berbasis syariah serta memiliki fasilitas jemput dana kerumah/kantor. Koperasi ini beralamat di karangasem, kec. Laweyan, Surakarta.

Modal dari koperasi ini berasal dari dana simpanan atau tabungan anggota, yang kemudian di pinjamkan kembali kepada anggota. Koperasi ini memperoleh keuntungan dari nisbah atau biasa disebut dengan margin bagi hasil dalam koperasi syariah, sebesar 2% – 2,5% dari pinjaman yang diberikan.

Wawancara singkat yang penulis lakukan dengan manager KSPPS Puteri Berseri, pada 3 juli 2024, koperasi ini memiliki beberapa masalah dalam kegiatan simpan pinjam yang berjalan pada koperasi tersebut, salah satu nya adalah adanya piutang tak tertagih dari anggota koperasi tersebut. Piutang dapat dikategorikan tidak tertagih apabila anggota sudah tidak membayar sama sekali dalam jangka waktu lebih dari 4 tahun terakhir. Berdasarkan informasi yang diperoleh, hal yang mempengaruhi piutang tidak tertagih adalah faktor ekonomi dan anggota yang berpindah domisili tanpa jejak. Dalam 5 tahun terakhir piutang tidak tertagih pada koperasi mengalami penurunan, hal ini dikarenakan koperasi melakukan pengendalian terhadap piutang tidak tertagih dengan menggunakan dana talang CKP (cadangan kerugian Piutang). Dana ini diperoleh dari SHU (Sisa Hasil Usaha) yang berasal dari pendapatan setiap bulan dikurangi beban operasional, dari SHU tersebut sebagian dibagikan kepada anggota dan sebagian disimpan untuk CKP sebagai antisipasi untuk piutang tidak tertagih. Dalam wawancara tersebut manager koperasi juga menyatakan bahwa musibah covid 19 mempengaruhi kenaikan piutang tidak tertagih namun tidak signifikan, hal ini dikarenakan koperasi melakukan pengendalian berupa tindakan jemput dana setiap hari ke rumah para anggota, sehingga koperasi tersebut mampu bertahan.

Manager koperasi tersebut mengatakan bahwa pendapatan pada koperasi tersebut lebih stabil dibandingkan koperasi lain. Informasi tersebut diperoleh dari anggota yang menanam saham pada lebih dari satu

koperasi saja. Mereka mengatakan bahwa pembagian SHU pada koperasi ini cenderung lebih stabil daripada koperasi- koperasi kecil lainnya.

Koperasi KSPPS Puteri Berseri Solo masih tergolong kedalam koperasi kecil karena jumlah aset yang dimiliki masih dibawah 4 miliar. Koperasi kecil cenderung lebih stabil dan memiliki permasalahan yang lebih sederhana, tidak seperti koperasi atau instansi besar yang memiliki permasalahan yang lebih kompleks.

Permasalahan yang terjadi pada koperasi ini perlu diperhatikan, karena piutang tak tertagih tetap berpengaruh pada kerugian serta menghambat operasional pada koperasi tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian pada koperasi, perlu diterapkan pengendalian internal piutang untuk meminimalisir piutang tak tertagih agar tidak menghambat kegiatan operasional pada koperasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pengendalian internal dan menggambarkan sistem pengendalian internal piutang pada koperasi tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas penulis memandang bahwa pengendalian internal penting untuk diterapkan guna meminimalisir piutang tak tertagih, selain itu sistem pengendalian internal dalam menghindari resiko piutang tak tertagih belum diketahui efektivitas penerapannya di koperasi Puteri Berseri Solo, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang sistem pengendalian internal dalam meminimalisir

piutang tak tertagih, dengan judul ***“SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL PIUTANG DALAM MEMINIMALISIR RESIKO
PIUTANG TAK TERTAGIH PADA KSPPS PUTRI BERSERI
SURAKARTA”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Persepsi manajemen KSPPS Puteri Berseri terhadap sistem pengendalian internal piutang ?
2. Apa saja faktor penyebab piutang tak tertagih pada koperasi puteri berseri solo?
3. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal piutang yang selama ini dilakukan oleh KSPPS Puteri Berseri Surakarta ?
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh manajemen KSPPS Puteri Berseri Surakarta dalam penerapan sistem pengendalian internal guna meminimalisir piutang tidak tertagih ?
5. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan pengendalian internal piutang pada KSPPS Puteri Berseri Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ditemukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Persepsi dan tanggapan dari manajemen KSPPS Puteri Berseri Surakarta tentang bagaimana penerapan sistem pengendalian internal.

2. Faktor- faktor yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar kredit sehingga menimbulkan piutang tak tertagih pada koperasi puteri berseri solo
3. Penerapan sistem pengendalian internal yang sudah dilakukan oleh KSPPS Puteri Berseri Surakarta
4. Kendala yang dialami dalam melakukan penerapan sistem pengendalian internal piutang tidak tertagih.
5. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala pengendalian internal piutang tidak tertagih pada koperasi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, studi perbandingan, atau referensi untuk penelitian selanjutnya dengan objek yang sama, namun dengan masalah yang lebih kompleks.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan-sumbangan fakta di lapangan (Koperasi) untuk ilmu di bidang keuangan yang berhubungan dengan pengendalian intern untuk meminimalisasi piutang tak tertagih.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pengendalian piutang dan resiko piutang

tak tertagih dan sebagai sarana menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh dalam perkuliahan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi koperasi Puteri Berseri Solo untuk dijadikan bahan pertimbangan, informasi dan acuan untuk terus meningkatkan pengendalian internal piutang dalam meminimalisasi piutang tak tertagih

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, referensi, atau sumber bacaan tentang pengendalian piutang dan piutang tak tertagih, serta sebagai bahan pustaka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Definisi Pengendalian Internal

Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dalam pencapaian tujuan usaha. Suatu perusahaan atau organisasi memerlukan pengendalian internal untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan wewenang, penyelewengan harta perusahaan, dan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi. Definisi pengendalian internal menurut Mulyadi dalam buku (Sumarlin, 2020) adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Hery dalam buku (Sumarlin, 2020) menyatakan pendapat terkait definisi pengendalian internal merupakan sebuah prosedur serta kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan bertujuan untuk memberi perlindungan atas kekayaan atau asetnya dari berbagai bentuk tindakan yang menyimpang atau terjadinya penyalahgunaan. Dengan harapan bahwa ini dapat memberi jaminan keakuratan persediaan informasi akuntansi, dan memberi

kepastian terkait tentang segala peraturan atau ketentuan undang-undang maupun hukum, juga kepatuhan terhadap kebijakan manajemennya atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pengendalian intern didefinisikan sebagai sistem pengendalian intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.

Pengendalian internal biasanya mutlak diperlukan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya transaksi bisnis perusahaan. Untuk menjalankan pengendalian internal secara baik tentu saja harus diikuti dengan kerelaan perusahaan untuk mengeluarkan beberapa tambahan biaya (Hery, 2014).

Dari definisi yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai macam unsur dengan tujuan untuk melindungi harta benda, meneliti ketetapan dan seberapa jauh dapat dipercayai data akuntansi, mendorong efisien operasi dan menunjang dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan. Kaitan pengendalian internal

dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko piutang tak tertagih pada koperasi, serta bagaimana penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan untuk melindungi aset koperasi dan menghindari resiko kerugian. Dengan adanya pengendalian internal yang baik dan efektif maka perusahaan dapat mencapai tujuannya yaitu profit dan terhindar dari kerugian, begitu juga sebaliknya apabila pengendalian internal yang diterapkan belum efektif.

Demikian juga pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun finansial perusahaan telah berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik, diharapkan seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik menuju tercapainya maksimalisasi profit.

2. Tujuan Pengendalian internal

Menurut (Mulyadi, 2008) tujuan dari pengendalian internal yaitu:

- a. Menjaga kekayaan perusahaan
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- c. Mendorong efisiensi
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Pengendalian internal yang dilakukan perusahaan tentunya memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan data yang tepat dapat dipercaya serta dapat melindungi harta perusahaan dari kesalahan dan penyelewengan, sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai visi misi yang telah ditetapkan.

3. Unsur Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi dalam (Sumarlin, 2020) unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4 unsur, yaitu :

- a. Struktur organisasi memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
- b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
- c. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak

diciptakan cara- cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaanya.

- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan

4. Prinsip- prinsip Pengendalian Internal

Menurut Bambang Hartadi dalam (Siregar, 2019) Berikut beberapa prinsip pengendalian internal yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan dari pengendalian internal :

- a. Pemisahan Fungsi Tujuan utama pemisahan fungsi yakni untuk menghindari dan mengawasi secepatnya atas kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi dalam pelaksanaan tugas.
- b. Prosedur Pemberian Wewenang Tujuan prinsip ini yakni untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisasi oleh orang yang berwenang.
- c. Prosedur Dokumentasi Dokumen yang layak, penting guna menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif.

Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggungjawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.

- d. Prosedur dan Pencatatan Akuntansi Tujuan dari pengendalian ini yakni agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang kemudian dapat diteliti secara cepat dan data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakannya tepat pada waktunya.
- e. Pengawasan Fisik Berhubungan dengan penggunaan alat- alat mekanisme dan elektronik dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.
- f. Pemeriksaan Internal Secara Bebas Menyangkut perbandingan antara catatan aset yang betul- betul ada,menyelenggarakan rekening- rekening control dan mengadakan perhitungan kembali gaji karyawan.

5. Keterbatasan Pengendalian Internal

Perlu diingat bahwa sistem pengendalian intern yang terbaik adalah bukan struktur pengendalian yang seketat mungkin secara maksimal, sistem pengendalian intern juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Kelemahan atau keterbatasan yang melekat pada sistem pengendalian intern menurut Sanyoto dalam (Zulvia, 2015) adalah sebagai berikut:

- a. Persekongkolan (kolusi)

Pengendalian intern mengusahakan agar persekongkolan dapat dihindari sejauh mungkin, misalnya dengan mengharuskan giliran bertugas, larangan dalam menjalankan tugas yang bertentangan oleh mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan, keharusan mengambil cuti dan seterusnya. Akan tetapi pengendalian intern tidak dapat menjamin bahwa persekongkolan tidak terjadi.

b. Perubahan

Struktur pengendalian intern pada suatu organisasi harus selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan kondisi dan teknologi.

c. Kelemahan manusia

Banyak kebobolan terjadi pada sistem pengendalian intern yang secara teoritis sudah baik. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pelaksanaan yang dilakukan oleh personil yang bersangkutan. Oleh karena, itu personil yang paham dan kompeten untuk menjalankannya merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengendalian intern.

d. Azas biaya manfaat

Pengendalian juga harus mempertimbangkan biaya dan kegunaannya. Biaya untuk mengendalikan hal-hal tertentu mungkin melebihi kegunaannya, atau manfaat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan (*cost-benefit analysis*).

6. Pengendalian Internal atas Piutang

Pada prinsipnya pengendalian internal harus meminimalisir serta memperbaiki masalah. Setiap perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan sebagian besar aset yang dimiliki adalah berupa piutang. Agar piutang yang dimiliki perusahaan dapat terealisasi tanpa adanya atau minim penunggakan pembayaran, perusahaan perlu menetapkan kebijakan piutang yang tepat, wujud dari kebijakan tersebut yaitu dengan pengendalian internal dan pengawasan atas piutang. Maka perusahaan perlu memperhatikan hal- hal sebagai berikut (Hery, 2015) :

a. Penetapan pemberian kredit

Kebijakan pemberian kredit dan syarat pemberian kredit haruslah ditetapkan dengan sebaik-baiknya agar tidak merugikan perusahaan. Pada umumnya dalam pemberian kredit berpedoman pada prinsip- prinsip 5C yang terdiri dari:

1) *Character* (watak)

Watak dapat diartikan sebagai kepribadian, moral dan kejujuran seseorang. Watak seorang nasabah sulit ditentukan apalagi bila nasabah baru pertama kali mengajukan permohonan kredit. Menentukan watak seorang debitur diperlukan pencarian informasi dan penyelidikan tentang kehidupan debitur. Pemberian

kredit kepada debitur yang memiliki watak tidak baik akan beresiko tinggi terhadap penyimpangan penggunaan kredit dari tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian. Penyimpangan tersebut dapat mengakibatkan pembayaran kredit tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sehingga kredit menjadi macet atau tidak tertagih.

2) *Capital* (modal)

Seseorang yang akan mengajukan kredit untuk keperluan produktif atau konsumtif harus memiliki modal. Sebagai contoh orang yang akan mengajukan kredit untuk membeli mobil maka pemohon kredit harus memiliki modal untuk membayar uang muka. Uang muka merupakan modal yang dimiliki oleh debitur dan kredit yang diajukan berfungsi sebagai tambahan modal. Pemohon kredit yang berbentuk usaha, besarnya modal yang dimiliki dapat dianalisa dari laporan keuangan. Semakin besar modal yang dimiliki maka kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang juga baik.

3) *Capacity* (kemampuan)

Untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang, debitur harus memiliki kemampuan cukup yang berasal

dari pendapatan. Analisa kemampuan debitur diperlukan untuk mendapatkan informasi secara benar mengenai data penghasilan atau pendapatan, sehingga memberikan keyakinan adanya kemampuan debitur dalam mengembalikan hutangnya.

4) *Collateral* (jaminan)

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutang nya maka pelunasan hutang dapat dilakukan dengan melakukan penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan tersebut. Jenis jaminan dapat meliputi jaminan yang bersifat materil berupa barang atau benda yang bergerak atau tidak bergerak seperti tanah ,bangunan, mobil, motor,saham dan jaminan yang bersifat inmateril misalnya jaminan pribadi dan garansi bank. Jaminan berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada pemberi kredit mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur tidak dapat melunasi hutang pada waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian.

5) *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi Negara perlu mendapat perhatian penuh dalam proses analisa kredit. Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit tersebut diberikan. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan pemohon kredit dalam mengembalikan hutangnya dan hal ini sering sulit untuk diprediksi. Kondisi ekonomi negara yang buruk dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan pemohon kredit yang berdampak pada kemampuan untuk melunasi hutangnya.

b. Penagihan

Perusahaan dapat melakukan pengendalian yang saat jatuh tempo belum melakukan pembayaran dengan dimulai dari cara pengiriman surat tagihan kepada para debitur, melalui telpon, melalui petugas yang datang ke debitur, atau melalui tindakan secara hukum.

c. Penetapan dan penyelenggaraan pengendalian internal yang tepat

Dalam penetapan pengendalian internal atas piutang ini, perusahaan harus memiliki prosedur yang tepat seperti :

- 1) Memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan dari fungsi akuntansi untuk piutang. Dengan demikian pegawai yang

menangani akuntansi untuk piutang dagang tidak boleh dilibatkan dengan aspek operasi.

- 2) Pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang.
- 3) Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan, dan penghapusan piutang harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- 4) Piutang harus dicatat dalam buku tambahan piutang. Total dari saldo- saldo buku tambahan ini harus dicocokkan dengan buku besar yang bersangkutan, paling tidak sebulan sekali. Disamping itu, pada akhir bulan para debitur harus dikirimkan surat pernyataan piutang.
- 5) Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya.

7. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris “Coperation” yang terdiri dari dua suku kata, yaitu ”co” yang berarti bersama dan “operation” yang artinya bekerja. Jadi secara keseluruhan koperasi berarti bekerja sama. Menurut

pengertian umum, koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang bekerja sama demi kesejahteraan bersama.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Jadi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota.

8. Jenis – Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 16 jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri dari lima jenis, yaitu:

1) Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.

2) Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi

3) Koperasi produsen

Koperasi produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

4) Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.

5) Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

9. Piutang

a. Pengertian Piutang

Istilah piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari

pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit (Hery, 2015)

Piutang usaha adalah hak yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain untuk menerima sejumlah uang kas akibat dari penjualan jasa secara kredit yang akan diterima pembayarannya oleh perusahaan pada saat atau setelah jatuh tempo (Sinaga, 2019)

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa piutang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pihak yang berutang kepada pemberi utang akibat dari peristiwa masa lalu dalam jangka waktu yang telah disepakati.

piutang diklasifikasikan sebagai lancar (jangka pendek) atau tidak lancar (jangka panjang). Piutang lancar (*current receivables*) diharapkan akan tertagih dalam satu tahun atau selama satu siklus operasi berjalan, dimana yang lebih panjang, semua piutang lain diklasifikasikan sebagai piutang tidak lancar (*non current receivables*), piutang selanjutnya diklasifikasikan dalam neraca baik sebagai piutang dagang atau piutang non dagang.

b. Resiko piutang

Setiap kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan pasti memiliki resiko baik yang menyebabkan kerugian maupun keuntungan bagi perusahaan dalam penerapannya, Menurut

Riyanto dalam (Astuti, 2018) Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan. Risiko yang mungkin terjadi dalam piutang usaha, yaitu:

a. Risiko tidak dibayarnya seluruh piutang

bagi perusahaan merupakan risiko paling berat yang harus dihadapi, karena seluruh tagihan yang telah direncanakan akan diterima di masa yang akan datang ternyata tidak dapat diterima kembali sebagai kas, sehingga pengorbanan yang telah dilakukan terbuang percuma.

b. Risiko tidak dibayar sebagian

adalah risiko yang lebih ringan karena sebagian dari total piutang tersebut telah diterima perusahaan. Sering sekali terjadi dalam kasus nyata sehari-hari, seorang pembeli yang baru pertama kali mengadakan hubungan transaksi penjualan kredit akan menunjukkan kesan yang sangat baik. Namun setelah waktu untuk membayar piutangnya tiba mulailah mereka menunjukkan itikad yang kurang baik.

Risiko ini akan mengurangi pendapatan perusahaan, dan akan menimbulkan Kerugian jika jumlah piutang yang

diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit.

c. Risiko keterlambatan pelunasan

merupakan risiko yang lebih ringan tetapi bukan berarti tidak mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan, karena meskipun dalam waktu yang relatif tidak lama jelas terlihat bahwa pemasukan dari uang tagihan tersebut telah melewati jadwal penerimaan yang seharusnya. Risiko ini akan menimbulkan tambahan dana perusahaan atau biaya penagihan.

d. Risiko tertanam modal Perusahaan

Risiko ini terjadi karena tingkat perputaran piutang yang rendah sehingga mengakibatkan jumlah modal kerja dalam piutang dan akan mengakibatkan modal kerja yang tidak produktif.

10. Piutang Tidak Tertagih

a. Pengertian piutang tak tertagih

Menurut Haryono dalam (Sinaga, 2019) piutang tak tertagih adalah piutang yang dapat menimbulkan kerugian karena debitur tidak mau atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Menurut Hery dalam (Sinaga, 2019) mengatakan piutang tak tertagih timbul karena adanya pelanggan yang tidak bisa

membayar karena menurunnya omzet penjualan sebagai akibat dari lesunya perekonomian dan kebangkrutan yang dialami oleh debitur.

Menurut Warren dalam (D.N Zebua, 2022) terdapat beberapa indikasi bahwa suatu piutang tidak dapat ditagih, diantaranya adalah :

- a) Saat piutang sudah jatuh tempo
- b) Pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih
- c) Pelanggan pailit
- d) Usaha pelanggan tutup
- e) Kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan.

Piutang tak tertagih adalah hak untuk menagih sejumlah uang dari penjual kepada pembeli karena adanya transaksi penjualan secara kredit yang belum atau tidak bisa dibayarkan tepat pada waktunya. Piutang tak tertagih terjadi akibat adanya beban yang timbul atas tidak ditagihnya piutang usaha atau kredit macet sehingga dapat dicatat dalam pembukuan sebagai beban operasional, yaitu dengan istilah akun, yaitu beban kredit macet (bad debts expense), atau beban piutang ragu-

ragu (doubtful accounts expense), atau beban piutang yang tidak dapat ditagih (uncollectible accounts expense).

b. Jenis – Jenis Piutang tak tertagih

Jenis-jenis piutang tak tertagih diantaranya :

- 1) Kredit dalam perhatian khusus
- 2) Kredit kurang lancar
- 3) Kredit diragukan
- 4) Kredit macet

c. Faktor – Faktor Piutang tak tertagih

Menurut Rivai, dkk dalam (Fauziah, 2022) kredit macet atau piutang tak tertagih dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor Internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari pihak kreditur. Faktor-faktor tersebut diantaranya:
 - 1) Keteledoran dari pihak kreditur mematuhi persetujuan pemberian piutang yang telah ditegaskan.
 - 2) Terlalu mudah memberikan piutang yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kekayaan.
 - 3) Konsentrasi piutang pada sekelompok pengguna jasa atau sektor usaha yang beresiko tinggi.
 - 4) Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian piutang.

- 5) Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepala para eksekutif dan staf bagian piutang.
 - 6) Lemahnya perusahaan mendeteksi timbulnya piutang macet termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas pengguna jasa atau debitur lama.
- b. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari pihak debitur. Faktorfaktor tersebut diantaranya :
- 1) Menurunnya kondisi ekonomi perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
 - 2) Adanya salah arus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang pengalaman dalam bidang usaha yang ditangani.
 - 3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit berkepanjangan, pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa anggota keluarga debitur.
 - 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
 - 5) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.

- 6) Watak buruk debitur (yang semula memang merencanakan tidak akan melunasi piutangnya).

d. Prosedur Penagihan Piutang

Ada beberapa cara untuk melakukan penagihan piutang, diantaranya :

1) Melalui Surat

Teknik ini dilakukan bilamana pembayaran hutang pelanggan dari pelanggan sudah lewat beberapa hari dari waktu yang telah ditentukan tetapi belum dilakukan pembayaran.

2) Melalui Telepon

Teknik ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari teknik sebelumnya, yaitu apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan masih belum dibayarkan.

3) Kunjungan Personal

Kunjungan personal yaitu dengan cara melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat pelanggan.

4) Tindakan-tindakan hukum

Teknik ini yang paling akhir dilakukan apabila ternyata pelanggan tidak menunjukkan itikad yang baik untuk melaksanakan kewajiban membayar hutangnya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu .

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL
1	Dimas Bagus Wicaksono (2023)	PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG USAHA DALAM MEMINIMALISIR RESIKO PIUTANG TAK TERTAGIH PADA CV.AMANAH BERSAMA	Pengendalian internal CV. Amanah Bersama sudah cukup baik dalam meminimalisir resiko piutang tak tertagih yang dilihat dari memisahkan fungsi pegawai, semua transaksi harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, piutang dicatat dalam buku penambahan piutang dan membuat daftar umur piutang.
2	Tari Wulandari Siregar (2019)	ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG USAHA UNTUK MEMINIMALKAN	implementasi sistem pengendalian internal yang sudah dilakukan adalah merubah sistem yang telah dibuat sebelumnya menjadi SAFI (<i>System Accounting, Financing, and Inventory</i>) yaitu sebagai

		PIUTANG TAK TERTAGIH PADA PT. JUANG JAYA ABDI ALAM CABANG MEDAN	pengawasan dari penjualan kredit. Pengendalian internal sudah dilakukan sesuai SOP yang berlaku
3	Adrin Nuradha Diana (2022)	ANALISIS SISTEM PENGENDALI AN INTERNAL PIUTANG PADA KPRI KOKARDAN	Keberadaan sistem pengendalian internal piutang pada KPRI Kokardan yaitu jika dilihat dari komponen COSO. Prosedur sistem pengendalian internal piutang berjalan dengan cukup baik hal ini ditandai dengan adanya prosedur awal tahap pemberian pinjaman dengan mengajukan formulir permohonan pinjaman di bagian kartu. Penilaian sistem internal pengendalian internal piutang kurang efektif meskipun ada yang

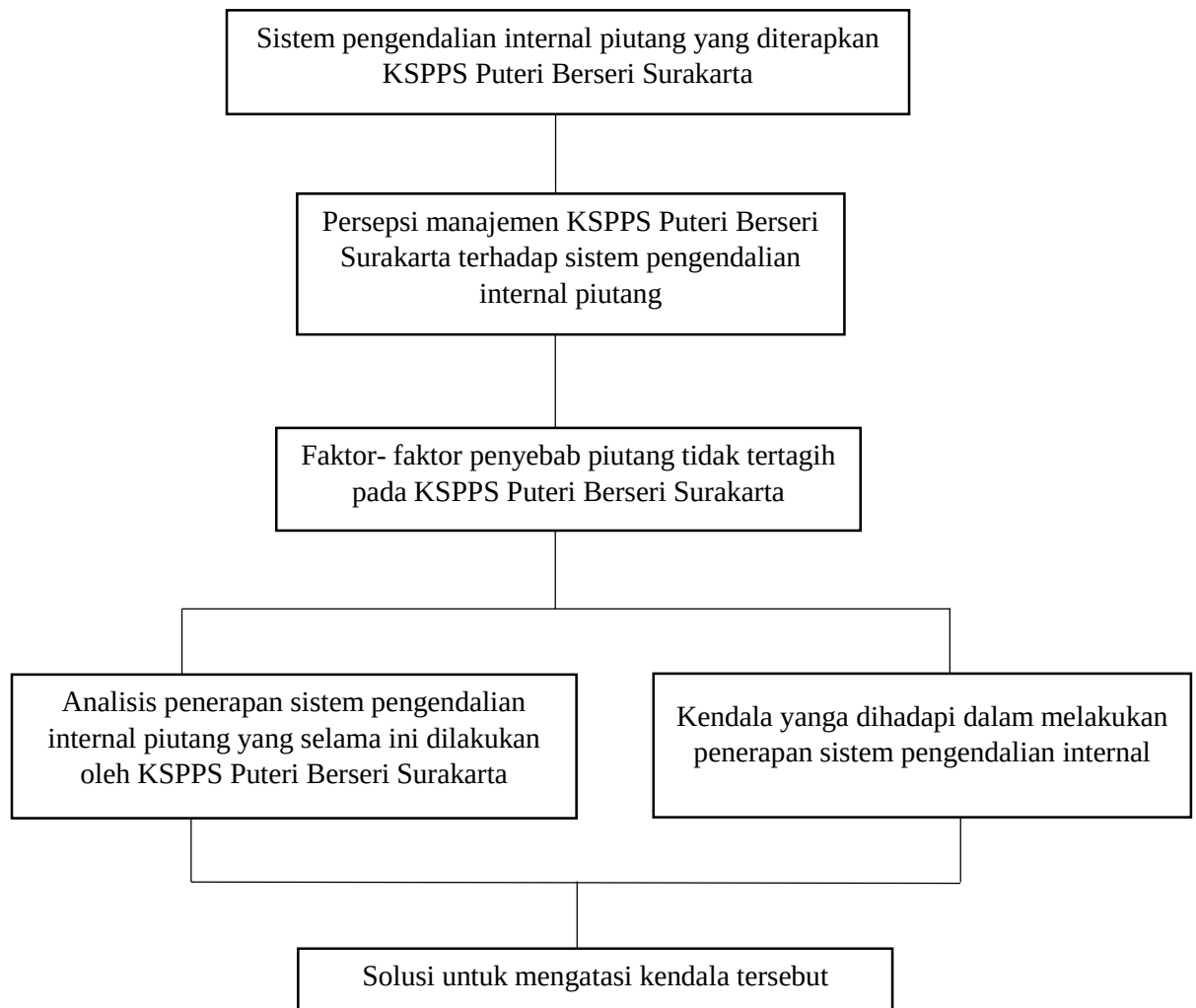
			telah dilakukan. Upaya perbaikan sistem pengendalian piutang dengan sistem pengendalian internal yaitu KPRI Kokardan harus memperbaiki komponen yang belum terlaksana
4	Jannatul Fithria Annisa, Puji Yuniarti (2023)	ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK MEMINIMALKAN PIUTANG TAK TERTAGIH PADA PT MUTIARA MULTI FINANCE GALUR	Pengendalian intern penagihan piutang PT Mutiara Multi Finance Cabang Galur sudah berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh perusahaan. Rasio tunggakan piutang tak tertagih pada PT Mutiara Multi Finance Cabang Galur untuk efektifitas sistem pengendalian piutangnya mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 rasio tunggaknya sebesar 8,6% lalu pada tahun 2021 rasio tunggaknya mengalami kenaikan

			menjadi 18,2% dan pada tahun 2022 rasio tunggakkannya dapat ditekan yang mengakibatkan penurunan terhadap persentase piutang tak tertagihnya menjadi sebesar 17,1%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2021 tunggakan piutang tak tertagihnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang disebabkan oleh beberapa faktor eksternal yaitu kondisi perekonomian kreditur yang tidak stabil dan kondisi keuangan kreditur yang buruk diakibatkan oleh pandemi yang masih sangat tinggi akan tetapi PT Mutiara Multi Finance Cabang Galur dapat memperbaiki kondisi tersebut yang dibuktikan oleh
--	--	--	---

			penurunan rasio tunggakan piutang tak tertagihnya pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian piutangnya sudah berjalan lebih efektif dari tahun sebelumnya.
5	Patricia M. Montororing, Harijanto Sabijono, Heince R. N. Wokas (2020)	ANALISIS PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG USAHA PADA PIUTANG TAK TERTAGIH DI PT HASJRAT MULTIFINANCE MANADO	Pada aktivitas pengendalian, analisis credit lalai dalam menganalisis sehingga jumlah penunggakan naik dan berpengaruh pada piutang tak tertagih. Penilaian resiko kurang efektif dalam mencegah makelar yang menggunakan identitas lain sehingga resiko piutang tak tertagih menjadi tinggi dan sulit dilacak, dan field collector belum melakukan pelaporan penagihan sebelum dan

			sesudah secara teratur yang mengakibatkan sistem penagihan kurang efektif
--	--	--	--

C. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab- bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi dari sistem pengendalian internal piutang dalam meminimalisir resiko piutang tak tertagih pada KSPPS Puteri Berseri Surakarta ini adalah dengan melakukan kegiatan jemput dana atau *collecting* untuk menghimpun dana, memperketat pemberian kredit dengan menerapkan analisis kelayakan kredit 5C, membuat prosedur pengajuan kredit serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan operasional koperasi tersebut.
2. Faktor- faktor yang menyebabkan piutang tak tertagih pada koperasi tersebut ada dua faktor yaitu, faktor internal meliputi pihak koperasi tidak konsisten dalam melakukan analisis kelayakan kredit sehingga terlalu mudah dalam memberikan kredit. Sedangkan faktor eksternal nya adalah kondisi ekonomi umum dan watak buruk nasabah.
3. Hambatan- hambatan yang dihadapi oleh perusahaan ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan pada faktor internal yaitu masih terdapat rangkap jabatan atau tidak ada pemisahan tugas secara tegas antara bagian manajer, marketing, dan

teller, sehingga dapat menimbulkan resiko kecurangan, kolusi, konflik kepentingan antar pegawai, dsb. Adanya kelalaian pihak koperasi dalam melakukan prosedur pemberian kredit, belum adanya catatan mengenai kenaikan atau penurunan kondisi piutang tak tertagih setiap tahunnya, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi. Adapun hambatan dari faktor eksternal yaitu muncul dari nasabah yang tidak bertanggung jawab atau berwatak buruk serta kondisi ekonomi umum.

B. Saran

Berikut saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian, mengenai analisis data dan kesimpulan dari sistem pengendalian internal piutang dalam meminimalisir resiko piutang tak tertagih pada KSPPS Puteri Berseri Surakarta :

1. Sebaiknya pihak koperasi melakukan pemisahan tugas secara tegas pada setiap divisi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, kecurangan, kolusi, konflik pribadi antar pegawai, dsb. Serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.
2. Melakukan pemberian kredit dan analisis kelayakan kredit sesuai prosedur yang telah ditentukan untuk menghindari timbulnya resiko yang tidak diinginkan.
3. Membuat catatan mengenai kenaikan atau penurunan kredit macet setiap tahunnya agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan

koperasi dapat terus berkembang serta terhindar dari kerugian di kemudian hari.

4. melakukan pengawasan dan evaluasi secara teratur. Tujuannya adalah jika terjadi kesalahan dapat di deteksi dan evaluasi secepatnya, serta dapat memastikan kegiatan operasional koperasi sudah sesuai prosedur yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W. (2018). Analisis Piutang Pada PT. Nuansa Dharma Cipta di Samarinda. *Ekonomia*, 1-15.
- D.N Zebua, d. (2022). Analisis Manajemen Piutang Dalam Meminimalisir Resiko Piutang Tak Tertagih Pada PT Multi Pilar Indah Jaya Kota Gunungsitoli. *Jurnal EMBA*, 1259-1268.
- Deborah, M. P. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Siklus Penjualan pada CV. Nirwana Offset Surabaya. *ETNIK: Jurnal Ekonomi - Teknik*, 421.
- Dewi, N. P. (2022). Analisis Pengendalian Internal Terhadap Piutang Usaha Dalam Mengurangi Resiko Piutang Tak Tertagih Pada BUMDESA Kerta Sari Utama.
- Diana, A. N. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang pada KPRI Kokardan. *Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 2086-3306.
- fakhrinie, A. I. (n.d.). Analisis Penerapan Prinsip 5C Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada PT. Mandala Multifinance Tbk, Cabang Martapura. *Kindai, Vol 16, Nomor 3*, 401-402.
- Fauzi, A. (2018). Peran Analisis Kredit Terhadap NPL Pada PT. X. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi* , 75-83.
- Fauziah. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Piutang Tak Tertagih Pada Perumda Air Minum Tirta Batang Hari. *Citra Ekonomi Vol : 3 No. 2 Oktober 2022*, 133-136.
- Hartadi, B. (1987). *Auditing Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hery. (2014). *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Hery. (2015). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Pt. Grasindo.
- Hery. (2017). *Akuntansi Dasar 1&2*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kurnia Ambarwati, L. H. (2022). Evaluasi Sistem Penagihan Piutang Usaha Pada PT Dua Putra Perkasa Pratama. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, 77-86.
- Kurniawati, Y. (2023). Analisis Perputaran Piutang Pada PT. Sarana Insani Sebagai Perusahaan Manufa. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 7 No. 1, 2023*, 276-277.

- Luh Putu Yusya Melati, W. E. (2023). Penerapan Prinsip 5C dan Relaksasi Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada koperasi Bayu Sudana di Tabanan . *JIKE (Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan)*, 57-67.
- M. Khairul Amri, D. H. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Piutang Terhadap Piutang Tak Tertagih Pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 187-206.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat .
- Patricia M. Montororing, H. S. (2020). Analisis Penerapan Pngendalian Internal Piutang Usaha Pada Piutang Tak Tertagih di PT Hasjrat Multifinance Manado. *Jurnal EMBA Vol.9 No.3 Juli 2020, Hal. 1520 - 1529*, 15211522.
- Siahaan, J. I. (2021). Pengendalian Internal Pengeluaran Kas pada PT. Jasindo Kantor Cabang Medan. *Repository Universitas HKBP Nommensen*.
- Sinaga, E. B. (2019). Analisis Faktor-FAktor Yang Mempengaruhi Piutang Tak Tertagih Pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Dengan Motivasi Membayar Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal EK&BI*, 118-130.
- Siregar, T. W. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih Pada PT. *MEDAN, J.J.A.A.C.*
- Sumarlin, S. M. (2020). *Kualitas Hasil Audit (Audit Internal)*. Makassar: Alauddin University Press.
- Umar Sidiq, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Wicaksono, D. B. (2023). Pengendalian Internal Piutang Usaha Dalam Meminimalisir Resiko Piutang Tak Tertagih Pada CV. Amanah Bersama.
- Yazid Salam Sinaga, S. S. (2023). Analisis Pengendalian Piutang Terhadap Resiko Piutang Tak Tertagih pada PT. Tri Sapta Jaya Sibolga. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* , 126-137.
- Zulvia, D. (2015). Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada Koperasi Pembangunan Sumbar. *Jurnal Riset dan Akuntansi*, 8-19.